



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK-RI)
UNIT KERJA : BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **AGUNG HARTONO**
2. Jabatan : **KEPALA SUBAUDITORAT**
3. NHK : **111339**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.075.502.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 444 m2/126 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 732.402.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 343.100.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	277.900.000
1. MOTOR, HONDA D1B02N26L2 A/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 10.900.000		
2. MOBIL, TOYOTA ALL NEW RUSH TRD SPORTIVO Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 267.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	213.278.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	464.923.464
F. HARTA LAINNYA	Rp.	99.478.860
Sub Total	Rp.	2.131.082.324
III. HUTANG	Rp.	284.166.628
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.846.915.696

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.